

**PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017**

**Laporan Hasil Penelitian**



Disusun Oleh:

**Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si**

**NIP. 19700825 199503 2 001**

**NIDN: 2025087002**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kualitas suatu bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses atau sistem yang dianggap strategis dan potensial untuk mengantarkan suatu bangsa dan negara pada pencapaian kualitas yang diharapkan.

Salah satu ukuran kualitas pendidikan adalah kualitas SDM yang dihasilkannya, dan ukuran kualitas SDM yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI). Menurut laporan UNDP, nilai HDI Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 0.689, termasuk dalam kategori negara dengan perkembangan menengah dan menempati urutan ke 113 dari 188 negara dan wilayah.

Belum maksimalnya kualitas SDM yang dihasilkan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor kualitas pendidik. Pendidik di sekolah/madrasah dalam hal ini adalah para guru yang memiliki tanggung jawab mendidik dan mengajar.

Menyadari pentingnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah RI melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI”.

Meski pencapaian Standar Pendidik merupakan sebuah keniscayaan, namun realitas menunjukkan bahwa masih banyak sekolah/madrasah yang

masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya, masih banyak ditemukan pendidik di sekolah/madrasah yang masih belum memenuhi tuntutan persyaratan profesionalisme. Mulyasa (2007) menyatakan bahwa profesionalisme guru di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola mengajar dan sistem konvensional ke sistem kompetensi, beban kerja guru yang tinggi, dan masih banyak guru yang belum melakukan penelitian tindakan kelas. Salah satu tolak ukur profesionalisme guru adalah hasil uji kompetensi guru (UKG). Hasil UKG SD tahun 2016, diperoleh rata-rata nasional sebesar 63,80, lebih kecil dari target capaian nilai rata-rata nasional, yaitu 65. Untuk Kabupaten Banyuasin sendiri, belum diperoleh data pasti tentang rata-rata hasil UKG yang dicapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme guru sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin dilihat dari pencapaian standar kualifikasi akademik?
2. Bagaimana profesionalisme guru sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin dilihat dari pencapaian kompetensi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengukur profesionalisme guru sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin dilihat dari pencapaian standar kualifikasi akademik; dan
2. mengukur profesionalisme guru sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin dilihat dari pencapaian standar kompetensi.

## **D. Hasil yang Diharapkan**

Temuan penelitian ini diharapkan menghasilkan empat hal sebagai berikut:

### **1. Output**

Menghasilkan data profesionalisme guru SD sebagai masukan kebijakan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru sehingga dapat memaksimalkan pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, khususnya pada jenjang sekolah dasar.

### **2. Outcome**

Berdasarkan masukan kebijakan ini, diharapkan dapat ditetapkan kebijakan dari pengambil keputusan (Dikdasmen Kemendikbud dan Pemkab Banyuasin) bagi peningkatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, khususnya pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

### **3. Benefit**

Mendorong guru untuk meningkatkan profesionalismenya guna mendukung pencapaian standar pendidik, terutama standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sesuai harapan.

### **4. Impact**

Meningkatkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama standar pendidik, khususnya di Kabupaten Banyuasin.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Profesionalisme Guru**

Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Online (2009), "*profession* merupakan kata benda yang berarti pekerjaan. Danim (2010) merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Kunandar (2007) menyatakan bahwa profesi berarti suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Menurut Yamin (2007), profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis. Dengan demikian, Kunandar (2007) mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

Adapun mengenai kata Profesional, berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai

keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 4, profesional digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya (Kunandar, 2007).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh guru sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria

guru profesional, dan profesinya itu telah menjadi sumber mata pencahariannya.

## **B. Peningkatan Profesionalisme Guru**

Ada berbagai strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan profesionalisme guru. Menurut Slameto (2011), strategi yang dapat dilakukan dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Pendidikan dan pelatihan guru antara lain dapat meliputi: 1) *in-house training* (IHT), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan, 2) program magang, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru, 3) kemitraan sekolah, yaitu pelatihan yang dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya, di bidang manajemen sekolah atau manajemen kelas, 4) belajar jarak jauh, yaitu pelatihan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya, 5) pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi, 6) kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, 7) pembinaan internal oleh sekolah, yaitu pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya, dan 8) pendidikan lanjut, yaitu pengikutsertaan guru dalam tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi.

Sedangkan kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, antara lain adalah: 1) diskusi masalah-masalah pendidikan, yang diselenggarakan secara berkala

dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah, 2) seminar, yaitu pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah, 3) workshop, yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya, 4) penelitian, baik dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, 5) penulisan buku/bahan ajar, baik berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan, 6) pembuatan media pembelajaran, baik berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran, serta 7) pembuatan karya teknologi/karya seni baik berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat (Slameto, 2011).

Selain yang sudah disebutkan, upaya peningkatan kemampuan guru juga dapat dilakukan secara mandiri. Untuk itu, menurut Slameto (2011) agar guru dapat mengembangkan kemampuan pedagogik dan profesionalnya secara mandiri diperlukan hal-hal berikut ini.

1. Memberikan peluang yang lebih banyak kepada guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis; pemahaman budaya dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar siswa, dan dengan asumsi yang lebih besar, dan meningkatkan tanggung jawab mengembangkan kurikulum, penilaian, dan berkolaborasi antar guru dengan dukungan teknologi.
2. Memberi lebih banyak waktu agar guru mengembangkan sikap baru, melakukan penilaian, berdiskusi, merenung, menilai, mencoba pendekatan baru dan mengintegrasikan mereka ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan menyediakan waktu untuk merencanakan pengembangan profesi mereka sendiri.

3. Pengembangan profesi yang lebih mengutamakan perbaikan kerja melalui penelitian untuk menyempurnakan pekerjaan sehari-hari yang lebih efektif, memusatkan kegiatan pada aktivitas guru pada tingkat satuan pendidikan.
4. Menyediakan pembina yang professional yang dapat membimbing dan membantu mereka dalam meningkatkan kinerja mengajar mereka, mereka juga meningkatkan kompetensi profesional diri mereka sendiri.
5. Melaksanakan kegiatan refleksi, sehingga monitoring proses perlu dilaksanakan secara efektif. Monitoring dapat diintegrasikan dalam sistem evaluasi diri sekolah. Dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi diri proses belajar yang berkembang efektif maka tingkat kepercayaan guru pada diri mereka sendiri dalam mengajar, siswa, belajar, dan mengajar terus dapat ditumbuhkan.
6. Mengintegrasikan guru dalam jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Memantau apa yang guru lain lakukan dan guru lain hasilkan terbukti dapat meningkatkan pendidik lebih termotivasi untuk berkesplorasi dan berinovasi dalam menyempurnakan pekerjaannya. Oleh karena itu meningkatkan kolaborasi guru dengan sekolah-sekolah yang baik di dalam negeri maupun dalam level internasional merupakan langkah yang patut mendapat pertimbangan yang serius dari para pemegang kebijakan pendidikan.

Berbagai strategi pembinaan dan pengembangan profesi guru seperti yang diuraikan di atas pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugas, namun hasil akhirnya sangat tergantung pada proses pelaksanaannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiana (2013) menunjukkan bahwa pembinaan kemampuan

profesional guru yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD pada umumnya dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan intensitas proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru serta meningkatnya motivasi guru sebagai salah satu faktor pendorong dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun, apabila ditinjau dari petunjuk pelaksanaan pembinaan masih jauh dari tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan pembinaan ini lebih banyak dilakukan secara kolektif baik melalui pertemuan secara berkelompok maupun melalui penataran-penataran.

Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Muharman (2013) menemukan bahwa pembinaan kemampuan profesional SD Swasta yang dilakukan oleh Kepala Sekolah belum optimal, hal ini terbukti dari banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan belum memiliki program kerja yang jelas. Kemudian persepsi dan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD terhadap peranannya dalam pelaksanaan pembinaan merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam upaya meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD dipandang kurang memadai karena kunjungan Pengawas ke sekolah tidak rutin. Pengawas TK/SD baru berkunjung ke sekolah apabila diminta Kepala Sekolah atau di sekolah ada masalah dengan guru.

Berbagai kelemahan pelaksanaan strategi peningkatan profesi guru tersebut kemungkinan salah satunya disebabkan program yang dilakukan lebih bersifat *top down* sehingga kurang menyentuh kebutuhan para guru.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan guna memberikan gambaran apa adanya dan utuh tentang pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin secara objektif dalam bentuk deskriptif.

#### **B. Lokasi penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Secara geografis, Kabupaten Banyuasin terbagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah perairan dan wilayah daratan. Di wilayah perairan terdapat 7 kecamatan, dengan 111 Sekolah Dasar dan 1876 guru. Sedangkan di wilayah daratan terdapat 12 kecamatan, dengan 115 Sekolah Dasar dan 1440 guru.

Sumber data penelitian adalah Dinas Pendidikan Pemuda olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen untuk memperoleh data tentang pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Telaah dokumen mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dimuat dalam Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Adapun dokumen-dokumen yang ditelaah meliputi dokumen cetak maupun elektronik seperti dokumen Dapodik dan dokumen UKG dari Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Banyuasin.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Dalam hal ini digunakan statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), statistik deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi atau hanya memberikan gambaran secara deskriptif. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana data itu diambil”.

Adapun langkah-langkah analisis yang ditempuh meliputi: 1) penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi; 2) deskripsi data diagram; dan 3) interpretasi data.

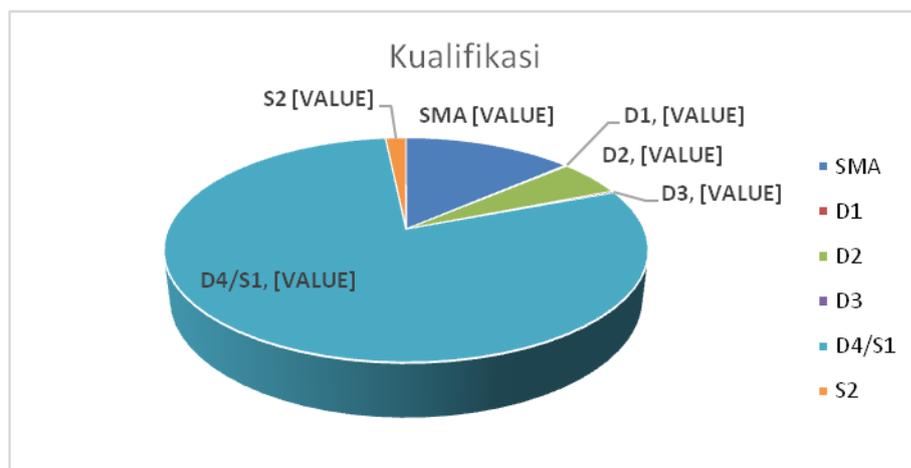
## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kualifikasi Akademik Guru SD di Kabupaten Banyuasin

Kualifikasi akademik guru SD di Kabupaten Banyuasin dalam penelitian ini dilihat berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kabupaten Banyuasin tahun 2017 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 5.734 orang guru SD yang ada di Kabupaten Banyuasin, sebanyak 775 orang (13,52%) berkualifikasi SMA, 10 orang (0,17%) berkualifikasi D1, 298 orang (5,20%) berkualifikasi D2, 15 orang (0,26%) berkualifikasi D3, 4.542 orang (79,21%) berkualifikasi D4/S1, dan 94 orang (1,64%) berkualifikasi S2. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru telah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar (D4/S1), namun yang berkualifikasi SMA jumlahnya cukup signifikan.

Gambaran selengkapnya kualifikasi akademik guru SD di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 1. Dalam bentuk diagram, dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 2. Kualifikasi Akademik Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

**Tabel 1. Kualifikasi Akademik Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

No.	Kecamatan	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	Jumlah
1	Air kumbang	38	0	9	0	175	2	224
2	Air saleh	25	0	17	0	211	6	259
3	Banyuasin I	36	0	14	0	302	5	357
4	Banyuasin II	65	1	5	2	162	1	236
5	Banyuasin III	43	3	30	0	455	12	543
6	Betung	45	1	15	1	277	4	343
7	Makarti Jaya	32	0	7	0	172	2	213
8	Muara Padang	33	0	16	0	155	2	206
9	Muara Sugihan	54	0	14	0	174	2	244
10	Muara Telang	18	0	13	0	203	0	234
11	Pulau Rimau	42	0	27	2	288	1	360
12	Rambutan	26	0	8	2	241	6	283
13	Rantau Bayur	71	2	19	2	293	7	394
14	Sembawa	33	0	25	1	227	5	291
15	Suak Tapeh	22	0	6	0	127	0	155
16	Sumber Marga Telang	36	0	3	1	109	1	150
17	Talang Kelapa	53	1	51	1	597	26	729
18	Tanjung Lago	45	1	11	2	210	8	277
19	Tungkal Ilir	58	1	8	1	164	4	236
	Jumlah	775	10	298	15	4.542	94	5.734
	Persentase	13,52	0,17	5,20	0,26	79,21	1,64	100

## **B. Kompetensi Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

Kompetensi guru SD di Kabupaten Banyuasin pada penelitian ini dilihat berdasarkan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2017 dari Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata. Hasil analisis deskriptif

terhadap data kompetensi 4.513 guru SD diperoleh rata-rata skor kompetensi guru sebesar 51,75, dengan median 50,60, modus 53,57, skor minimum 8,93, dan skor maksimum 95,24. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rata-rata skor kompetensi guru SD di Kabupaten Banyuasin masih berada di bawah standar kompetensi minimal tahun 2017, yaitu 70. Statistik deskriptif data kompetensi guru SD di Kabupaten Banyuasin selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Data Kompetensi Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

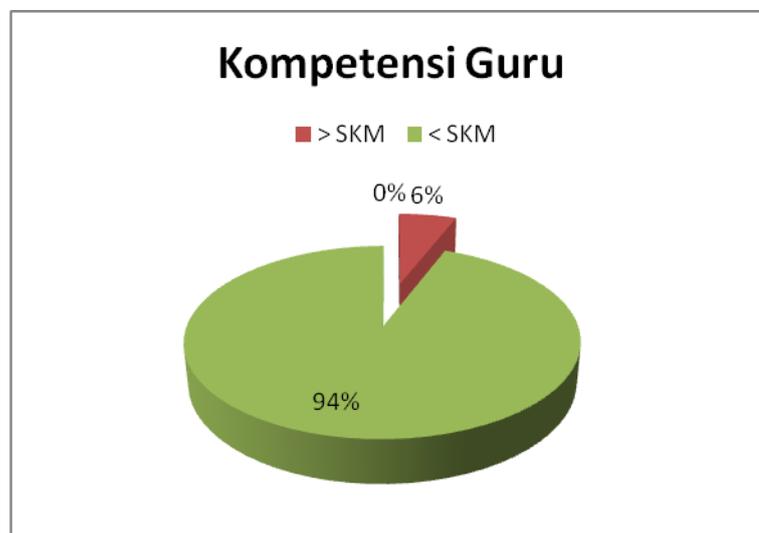
Mean	51,75
Median	50,60
Modus	53,57
Minimum	8,93
Maksimum	95,24

Selanjutnya, kompetensi guru dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompetensi di atas Standar Kompetensi Minimum (SKM) ( $> SKM$ ) dan kompetensi di bawah atau sama dengan SKM ( $\leq SKM$ ). Berdasarkan kategori tersebut, maka distribusi frekuensi data kompetensi guru SD di Kabupaten Banyuasin sebagaimana tampak dalam tabel 3.

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

No.	Kompetensi	Frekuensi	Persentase
1	$> SKM$	265	6
2	$\leq SKM$	4.248	94
	Jumlah	4.513	100

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 4.513 guru SD yang mengikuti UKG di Kabupaten Banyuasin, hanya 265 orang (6%) yang memiliki kompetensi > SKM dan 4.248 orang (94%) yang memiliki kompetensi ≤ SKM. Dengan demikian, jumlah guru yang memiliki kompetensi ≤ SKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru yang memiliki kompetensi > SKM. Dalam bentuk grafik, gambaran kompetensi guru SD di Kabupaten Banyuasin disajikan pada gambar 2.



**Gambar 2. Kompetensi Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kompetensi guru SD di Kabupaten Banyuasin, berikut ini dideskripsikan masing-masing kompetensi.

### ***1. Kompetensi Pedagogik***

Hasil analisis deskriptif terhadap data kompetensi pedagogik 4.513 guru SD di Kabupaten Banyuasin, diperoleh rata-rata skor kompetensi pedagogik guru sebesar 46,16, dengan median 44,64, modus 44,64, skor minimum 4,96, dan skor maksimum 99,21. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rata-rata kompetensi pedagogik guru SD di Kabupaten Banyuasin masih berada dibawah SKM 2017. Statistik deskriptif data

kompetensi pedagogik guru SD di Kabupaten Banyuasin selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif Data  
Kompetensi Pedagogik Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

Mean	46,16
Median	44,64
Modus	44,64
Minimum	4,96
Maksimum	99,21

Selanjutnya, kompetensi pedagogik guru dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompetensi di atas Standar Kompetensi Minimum (SKM) dan kompetensi di bawah atau sama dengan SKM. Berdasarkan kategori tersebut, maka distribusi frekuensi data kompetensi pedagogik guru SD di Kabupaten Banyuasin sebagaimana nampak dalam tabel 5.

**Tabel 5. Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi Pedagogik  
Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

No.	Kompetensi	Frekuensi	Persentase
1	> SKM	136	3
2	≤ SKM	4.377	97
	Jumlah	4.513	100

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 4.513 guru SD yang mengikuti UKG di Kabupaten Banyuasin, hanya 136 orang (3%) yang memiliki kompetensi pedagogik > SKM dan 4.377 orang (97%) yang memiliki kompetensi pedagogik ≤ SKM. Dengan demikian, jumlah guru yang memiliki kompetensi pedagogik ≤ SKM lebih banyak dibandingkan

dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik > SKM. Dalam bentuk grafik, gambaran kompetensi pedagogik guru SD di Kabupaten Banyuasin disajikan pada gambar 3.



**Gambar 3. Kompetensi Pedagogik Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

## **2. Kompetensi Profesional**

Hasil analisis deskriptif terhadap data kompetensi profesional 4.513 guru SD di Kabupaten Banyuasin, diperoleh rata-rata skor kompetensi profesional guru sebesar 54,14, dengan median 53,15, modus 53,15, skor minimum 10,63, dan skor maksimum 97,79. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rata-rata kompetensi profesional guru SD di Kabupaten Banyuasin lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi pedagogiknya namun masih berada dibawah SKM. Statistik deskriptif data kompetensi profesional guru SD di Kabupaten Banyuasin selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Statistik Deskriptif Data Kompetensi Profesional Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

Mean	54,14
Median	53,15
Modus	53,15
Minimum	10,63
Maksimum	97,79

Selanjutnya, kompetensi profesional guru dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompetensi di atas Standar Kompetensi Minimum (SKM) dan kompetensi di bawah atau sama dengan SKM. Berdasarkan kategori tersebut, maka distribusi frekuensi data kompetensi profesional guru SD di Kabupaten Banyuasin sebagaimana tampak dalam tabel 7.

**Tabel 7. Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi Profesional Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

No.	Kompetensi	Frekuensi	Persentase
1	> SKM	620	14
2	≤ SKM	3.893	86
	Jumlah	4.513	100

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 4.513 guru SD di Kabupaten Banyuasin yang mengikuti UKG, hanya 620 orang (14%) yang memiliki kompetensi profesional > SKM dan ada 3.893 orang (86%) yang memiliki kompetensi profesional ≤ SKM. Dengan demikian, jumlah guru yang memiliki kompetensi profesional ≤ SKM sedikit lebih banyak dibandingkan dengan guru yang memiliki kompetensi profesional > SKM. Dalam bentuk grafik, gambaran kompetensi profesional guru SD di Kabupaten Banyuasin disajikan pada gambar 4.



**Gambar 5. Kompetensi Profesional Guru SD di Kabupaten Banyuwasin**

### **C. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Guru yang Dilakukan KKG**

Data tentang kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang dilakukan KKG dalam penelitian ini diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pengurus KKG se-Kabupaten Banyuwasin dan penyebaran kuesioner. Adapun hasil FGD tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Program/Kegiatan yang Dilakukan KKG**

Untuk meningkatkan profesionalisme guru, program/kegiatan yang dilakukan KKG dapat meliputi kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan. Program/kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan meliputi: workshop, pelatihan, diklat berjenjang, seminar/lokakarya/kolokium/diskusi panel, dan *lesson study*. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar guru menyatakan bahwa KKG tidak pernah mengadakan *lesson study*(92,31%) dan diklat berjenjang (69,23%), sedangkan pelatihan merupakan program/kegiatan yang sering dilakukan (53,85%). Gambaran selengkapnya program/kegiatan pengembangan yang dilakukan KKG di Kabupaten Banyuwasin dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Program/Kegiatan Pengembangan yang Dilakukan KKG**

No.	Program/Kegiatan	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Workshop	23,08	69,23	7,69
2	Pelatihan	53,85	46,15	0
3	Diklat Berjenjang	0	30,77	69,23
4	Seminar/Lokakarya/Kolokium/ Diskusi Panel	23,08	46,15	30,77
5	<i>Lesson Study</i>	0	7,69	92,31

**2. Fokus Pelatihan yang Dilakukan KKG**

Sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme guru, pelatihan dapat difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi, pendekatan, model, dan metode, pengembangan media pembelajaran, penilaian hasil belajar, penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah, serta pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa semua guru (100%) menyatakan bahwa pelatihan yang selama ini dilakukan KKG sering difokuskan pada penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian hasil belajar, sedangkan 84,62% menyatakan bahwa pelatihan sering berfokus pada pengembangan bahan ajar. Gambaran selengkapnya fokus pelatihan yang dilakukan KKG di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9. Fokus Pelatihan yang Dilakukan KKG**

No.	Fokus	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Penyusunan perangkat pembelajaran	100	0	0
2	Pengembangan bahan ajar	84,62	7,69	7,69
3	Pengembangan strategi, pendekatan, model, & metode pembelajaran	69,23	23,08	7,69
4	Pengembangan media pembelajaran	69,23	23,08	7,69
5	Penilaian hasil belajar	100	0	0
6	Penyusunan program remedial dan pengayaan	76,92	23,08	0
7	Penelitian tindakan kelas & penulisan karya ilmiah	30,77	53,85	15,38
8	Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran	0	69,23	30,77

### **3. Lama Pelatihan yang Dilaksanakan KKG**

Untuk melaksanakan pelatihan, diperlukan waktu yang sesuai dengan tuntutan pencapaian tujuan. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa lama pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan KKG seringkali kurang dari 3 hari (100% guru menyatakan hal ini). Gambaran selengkapnya tentang lama waktu pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan KKG di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 10. Lama Pelaksanaan Pelatihan oleh KKG**

No.	Lama Kegiatan	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Kurang dari 3 hari	100	0	0
2	3 hari	0	38,46	61,54
3	1 minggu	15,38	7,69	76,92
4	2 – 3 minggu	7,69	15,38	76,92
5	1 - 3 bulan	0	7,69	92,31
6	> 3 bulan	0	0	100

#### **4. Penggunaan Sarana Prasarana dalam Pelatihan KKG**

Keberhasilan pelaksanaan pelatihan salah satunya harus didukung dengan penggunaan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang digunakan meliputi sarana prasarana utama dan tambahan. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa sarana utama yang selalu digunakan dalam pelatihan KKG di Kabupaten Banyuasin adalah komputer/laptop (76,92%), sedangkan media pembelajaran dan OHP/LCD proyektor kadang-kadang saja digunakan. Untuk sarana prasarana tambahan hanya internet dan davinet (Digital Audio Visual Network) yang kadang-kadang digunakan (61,54%), sedangkan laboratorium IPA, perpustakaan, audio visual aids (AVA), serta handycam dan kamera digital tidak pernah digunakan. Gambaran selengkapnya tentang penggunaan sarana prasarana dalam pelatihan KKG di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11. Penggunaan Sarana Prasarana dalam Pelatihan KKG**

No.	Sarana Prasarana	Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah
Utama				
1	Komputer/laptop	76,92	23,08	0
2	Media pembelajaran	23,08	61,54	15,38
3	OHP/LCD proyektor	23,08	53,85	23,08
Tambahan				
4	Laboratorium IPA	0	7,69	92,31
5	Perpustakaan	15,38	38,46	46,15
6	Audio Visual Aids (AVA)	0	15,38	84,62
7	Handycam dan Kamera Digital	7,69	23,08	69,23
8	Internet dan Davinet (Digital Audio Visual Network)	0	61,54	38,46

### 5. Metode yang Digunakan dalam Pelatihan KKG

Selain ditunjang sarana prasarana yang memadai, keberhasilan pelatihan juga ditentukan oleh penggunaan metode pelatihan yang sesuai. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa metode yang sering digunakan adalah ceramah (100%) dan diskusi (92,31%), sedangkan metode latihan/praktek dan penugasan jarang digunakan. Gambaran selengkapnya tentang metode yang digunakan dalam pelatihan KKG di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 12.

**Tabel 12. Metode yang Digunakan dalam Pelatihan KKG**

No.	Metode	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Ceramah	100	0	0
2	Diskusi	92,31	7,69	0
3	Latihan/praktek	30,77	61,54	7,69
4	Penugasan	46,15	53,85	0

## 6. *Nara Sumber Pelatihan KKG*

Unsur yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pelatihan adalah nara sumber. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelatihan KKG sering melibatkan nara sumber dari unsur pengawas (92,31%), sedangkan unsur nara sumber yang tidak pernah dilibatkan adalah pejabat Kemendikbud (100%) dan dosen (84,62%). Gambaran selengkapnya tentang nara sumber pelatihan KKG di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 13.

**Tabel 13. Nara Sumber Pelatihan KKG**

No.	Unsur	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	LPMP	7,69	23,08	69,23
2	Guru Inti	61,54	38,46	0
3	Pengawas	92,31	0	7,69
4	Kepala sekolah	61,54	30,77	7,69
5	Dosen	0	15,38	84,62
6	Pejabat Dinas Pendidikan	23,08	61,54	15,38
7	Pejabat Kemendikbud	0	0	100

## 7. *Kendala Pelaksanaan Kegiatan KKG*

Pelaksanaan kegiatan KKG seringkali dihadapkan pada sejumlah kendala, baik kendala sarana prasarana, pendanaan, akses/kerjasama dengan LPMP & Perguruan Tinggi, nara sumber, waktu pelaksanaan kegiatan, guru, metode yang digunakan, maupun dukungan stakeholders. Hasil FGD dan kuesioner menunjukkan bahwa kendala yang paling dirasakan oleh mayoritas pengurus KKG adalah sarana dan prasarana (92,31%) dan pendanaan (84,62%). Gambaran selengkapnya tentang kendala pelaksanaan kegiatan KKG di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 14.

**Tabel 14. Kendala Pelaksanaan Kegiatan KKG**

No.	Kendala	Persentase
1	Sarana dan prasarana	92,31
2	Pendanaan	84,62
3	Akses/kerjasama dengan LPMP & Perguruan Tinggi	76,92
4	Nara sumber	61,54
5	Waktu pelaksanaan kegiatan	53,85
6	Guru	53,85
7	Metode yang digunakan	38,46
8	Dukungan <i>stakeholders</i>	23,08

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pencapaian Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SD di Kabupaten Banyuasin**

Dari segi kualifikasi akademik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5.734 orang guru SD yang ada di Kabupaten Banyuasin, sebagian besar (4.542 orang atau 79,21%) berkualifikasi D4/S1, bahkan ada 94 orang (1,64%) berkualifikasi S2. Namun ditemukan juga 13,52% guru yang hanya berkualifikasi SMA, 5,20% berkualifikasi D2, 0,26% berkualifikasi D3, dan 0,17% berkualifikasi D1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih cukup banyak guru SD di Kabupaten Banyuasin yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

Dari segi kompetensi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kompetensi yang dicapai guru SD di Kabupaten Banyuasin pada Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2017 adalah sebesar 51,75, masih jauh dari capaian target rata-rata nasional, yaitu 70. Kondisi tersebut juga ditemukan baik pada kompetensi pedagogik maupun kompetensi

profesional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa banyak guru SD di Kabupaten Banyuasin yang belum memenuhi standar kompetensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak guru SD di Kabupaten Banyuasin yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang ditetapkan. Ini berarti masih cukup banyak upaya yang harus dilakukan baik oleh Pemerintah, sekolah, maupun para guru sendiri untuk meningkatkan kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil UKG nasional tahun 2016 yang menunjukkan bahwa masih banyak guru SD yang memiliki kompetensi di bawah standar SKM.

Rendahnya kualifikasi akademik dan kompetensi guru tentu akan berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai guru, dan kinerja guru yang tidak maksimal tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dan akhirnya juga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Heyneman dan Loxley di 29 negara menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga mutu pendidikan (yang ditunjukkan dari prestasi belajar siswa) ditentukan oleh guru. Di 16 negara berkembang, guru memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar siswa sebesar 34%, paling besar dibandingkan dengan sarana fisik (26%), manajemen (22%), dan waktu belajar (18%) (Supriadi, 1999: 179).

## **2. *Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Guru yang Dilakukan KKG***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang sering dilakukan oleh KKG di Kabupaten Banyuasin adalah kegiatan pelatihan, dan pelatihan yang dilakukan lebih sering berfokus pada penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian hasil belajar, dengan lama kegiatan < 3 hari. Meski demikian, pelatihan tetap merupakan kegiatan yang paling disukai oleh guru dan lama kegiatan yang disukai  $\leq 3$  hari, sedangkan fokus kegiatan yang paling dibutuhkan adalah penyusunan perangkat pembelajaran dan penyusunan program remedial dan pengayaan. Sarana yang selalu digunakan adalah

komputer/laptop, sementara sarana prasarana lain baik yang utama maupun tambahan tidak pernah digunakan. Metode pelatihan yang sering digunakan adalah ceramah dan diskusi, jarang menggunakan latihan/praktek dan penugasan. Nara sumber yang sering digunakan adalah pengawas, guru inti, dan kepala sekolah. Kendala yang banyak dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya sarana prasarana dan pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang dilakukan oleh KKG di Kabupaten Banyuasin belum maksimal sehingga memerlukan pembenahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang dilakukan KKG di Kabupaten Banyuasin selama ini belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari masih minimnya kegiatan yang dilaksanakan sehingga masih banyak guru yang belum tersentuh oleh kegiatan KKG. Selain itu, karena terkendala sarana prasarana dan pendanaan, kegiatan yang dilaksanakan masih memilikikelemahan baik dilihat dari segi keragaman kegiatan, fokus kegiatan, lama pelaksanaan kegiatan, sarana prasarana yang digunakan, juga metode dan nara sumber yang digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Soviawati (2004) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan KKG masih memiliki beberapa kelemahan antara lain kurang berfungsi dalam meningkatkan kinerja guru dan memberikan informasi tentang tugas dan cara baru dalam proses belajar mengajar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi, masih banyak guru SD di Kabupaten Banyuasin yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dari segi kualifikasi akademik, masih ada 13,52% guru yang hanya berkualifikasi SMA, 5,20% berkualifikasi D2, 0,26% berkualifikasi D3, dan 0,17% berkualifikasi D1. Dari segi kompetensi, rata-rata skor kompetensi yang dicapai guru SD di Kabupaten Banyuasin pada Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2017 adalah sebesar 51,75, masih jauh dari capaian target rata-rata nasional, yaitu 70.
2. Kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang dilakukan KKG di Kabupaten Banyuasin selama ini meski sudah relevan dengan tuntutan kebutuhan para guru, namun belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari masih minimnya kegiatan yang dilaksanakan sehingga masih banyak guru yang belum tersentuh oleh kegiatan KKG. Selain itu, karena terkendala sarana prasarana dan pendanaan, kegiatan yang dilaksanakan masih memiliki kelemahan baik dilihat dari segi keragaman kegiatan, fokus kegiatan, lama pelaksanaan kegiatan, sarana prasarana yang digunakan, juga metode dan nara sumber yang digunakan.

#### **B. Saran-saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin, hendaknya memberikan perhatian yang lebih untuk meningkatkan pencapaian standar kualifikasi akademik

dan kompetensi guru mengingat masih banyaknya guru SD di Kabupaten Banyuasin yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.

2. Bagi Kelompok Kerja Guru (KKG) di Kabupaten Banyuasin, hendaknya dapat terdorong untuk meningkatkan perannya dalam mengembangkan profesionalisme guru guna mendukung pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sesuai harapan.
3. Bagi para guru, hendaknya berupaya melakukan upaya mandiri dan meningkatkan motivasi guna meningkatkan kompetensi melalui keterlibatan dalam kegiatan KKG yang ada di wilayah masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiansyah, Yan. 2012. "Efektivitas Program Pendampingan Kelompok Kerja Guru Pola *Lesson Study* terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogis Guru Penjasorkes". *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, dalam <http://repository.upi.edu/10453/>, diakses tanggal 20 Juni 2017.
- Budiana, Dian. 2013. "Pembinaan Kemampuan Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran: Studi Kualitatif tentang Pembinaan Kemampuan Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran oleh Pengawas TK/SD Pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang", *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, diakses tanggal 12 April 2017.
- Cerbin, Bill & Kopp, Bryan. 2009. *A Brief Introduction to College Lesson Study. Lesson Study Project*. online: <http://www.uwlax.edu/sotl/lsp/index2.htm>., diakses tanggal 12 April 2017.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Kepemimpinan Pendidikan (Kepemimpinan Jenius IQ+EQ, Etika, Perilaku Motivasional, dan Mitos)*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Dirjen PMPTK. 2008. *Standar Pengembangan KKG/MGMP*. Jakarta: Depdiknas RI.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bahan Belajar Mandiri Pengelolaan Kualitas KKG/MGMP*, Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*. Depdiknas. Jakarta.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.
- Muharman. 2013. "Pembinaan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar Swasta di Provinsi Riau: Studi Kasus Pembinaan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD di Kotamadya Pekanbaru", *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, dalam <http://repository.upi.edu/1009/>, diakses tanggal 12 April 2017.
- Mulyana, Slamet. 2007. *Lesson Study* (Makalah). Kuningan: LPMP-Jawa Barat

- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang *Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah*.
- Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang *Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*.
- Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*.
- Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Rahayu, P.; Mulyani, S.; dan Miswadi, SS. 2012. "Pengembangan Pembelajaran IPA Terpadu dengan Menggunakan Model Pembelajaran Problem Base Melalui *Lesson Study*". *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, dalam <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii/article/viewFile/2015/2129>.
- Slameto. 2011. *Determinan Kesiapan Guru SD Jawa Tengah dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan*. Salatiga: PGSD FKIP UKSW.
- Soviawati. 2004. "Studi Dekripsi Persepsi Guru Terhadap Fungsi KKG (Kelompok Kerja Guru)". *Tesis*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dalam <http://repository.ubaya.ac.id/11213/>
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. 2009. "Kegiatan KKG dan MGMP Rintisan Program BERMUTU Membabat Habis Penyakit Kronis Guru", *Buletin BERMUTU*, 4, (1), h. 7.
- Sulaeman, M. Siddik. 2013. "Pelaksanaan KKG dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar: Analisis Kualitatif terhadap Kegiatan KKG Gugus I Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, dalam

[http://repository.upi.edu/936/8/T\\_PK\\_019622\\_Chapter5.pdf](http://repository.upi.edu/936/8/T_PK_019622_Chapter5.pdf), diakses tanggal 20 Juni 2017.

Sumadji. 2013. *Revitalisasi KKG Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan*, dalam <http://pendidikan.pr-obolinggokab.go.id>, diakses tanggal 2 Agustus 2015.

Trimio. 2007. *Studi Kasus Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG)*, dalam <http://researchengines.com/0807trimo1.html>, diakses tanggal 20 Juni 2017.

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Yamin, Martinis. 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. Ke-2.